

Strategi Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bintan

Riang Anggraini¹, Rudi Subiyakto², Nur Ilmiah Rivai³

^{1,2,3}Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Maritim
Raja Ali Haji, Tanjungpinang

Abstract

DPRD as part of regional government administration has an important task in increasing efficiency, productivity and accountability in government administration. Quality services from the Bintan Regency DPRD Council Secretariat are very important to ensure effective and efficient DPRD performance. This research aims to determine the service strategy carried out by the secretariat of the Bintan Regency DPRD council. This research uses a qualitative descriptive research method. Primary and secondary data are data sources in research. Research results (1) The implementation of organizational strategy can be seen from the preparation of Standard Operating Procedures (SOP) which provide clear guidance for DPRD members in carrying out their duties. (2) the program strategy is implemented through the implementation of an information management system, provision of better information services, as well as training and guidance for DPRD members. (3) human resources (HR) support strategies are carried out with selective recruitment, continuous training, and development of skills and competencies. (4) institutional strategies are implemented through providing logistical and administrative support, preparing activity agendas, routine coordination mechanisms, and appointing inter-departmental coordinators. In conclusion, the implementation of these strategies has improved the quality of DPRD council secretariat services to members of the Bintan Regency DPRD.

Keywords: *Strategy, Services, DPRD Council Secretariat*

Pendahuluan

Pelayanan publik adalah elemen krusial dalam menjalankan pemerintahan dan berperan sebagai penanda utama dalam mengevaluasi kinerja pemerintah, baik di tingkat nasional maupun lokal. Pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat akan membawa dampak positif berupa kepuasan masyarakat,

karena masyarakat dapat menilai kinerja pelayanan secara langsung menurut Hayat dalam (Sellang et al., 2019)

Layanan ini merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Kutipan ini disesuaikan dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik dan mengacu pada rangkaian tindakan yang dilakukan oleh lembaga pelayanan publik dengan tujuan memenuhi kebutuhan layanan warga negara dan penduduk yang terkait dengan barang, jasa, dan/atau layanan administratif yang disediakan oleh lembaga tersebut. Pemberi layanan di tingkat daerah saat ini menjadi garda terdepan dalam berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan yang ada, termasuk upaya untuk memastikan bahwa layanan tersebut dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat dari berbagai latar belakang, di mana pun dan kapan pun. Mereka memainkan peran penting dalam konteks desentralisasi saat ini (Anggraeni & Utomo, 2015)

Sekretariat Dewan harus berkembang menjadi unit organisasi yang dapat memberikan layanan terbaik dan mendukung setiap kegiatan Dewan, dengan tanggung jawab administratif dan teknis kepada pimpinan Dewan melalui sekretariat daerah. Untuk mencapai tujuan ini, kinerja pegawai harus memuaskan (Juru & Gorda, 2021). Tugas lain yang tidak kalah penting adalah menerima aspirasi dan pengaduan dari masyarakat, dengan kemampuan mendengarkan, mencatat aspirasi tersebut, dan menyampaikannya kepada anggota dewan yang bersangkutan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Sekretariat DPRD juga memiliki tanggung jawab dalam menyediakan informasi publik yang akurat dan terkini kepada masyarakat, yang dapat dilakukan melalui penyediaan dokumen resmi, pengumuman di media massa, atau melalui situs web resmi DPRD.

Meskipun tidak memiliki hak suara langsung, sekretariat DPRD dapat memberikan masukan dan informasi kepada anggota dewan dalam proses pengambilan keputusan, yang penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Dengan semakin baik pelayanan dari Sekretariat DPRD Bintan kepada anggota DPRD Bintan akan memberikan kontribusi dan efek domino terhadap kinerja dan tugas anggota DPRD kepada masyarakat Bintan secara umum. Hal ini di dasarkan bahwa kondisi yang dialami masyarakat yang semakin kritis dalam menanggapi segala hal yang menyangkut kehidupan dan kemasyarakatan maka mereka menuntut pelayanan dan kinerja anggota DPRD yang profesional dalam mengakomodir dan menjangkau aspirasi serta keinginan masyarakat. Kondisi ini sangat di mungkinkan jika anggota DPRD juga mendapatkan pelayanan dari sekretariat DPRD Bintan secara profesional, efektif, transparan, tepat waktu dan responsif. Oleh karena itu Sekretariat DPRD Bintan sebagai penyedia layanan yang di butuhkan DPRD Bintan harus dapat memberikan kualitas pelayanan yang terbaik dan senantiasa menunjukkan kinerja kualitas pelayanan semangkin hari semakin baik pula.

Tugas dan fungsi Dewan, pengelolaan kesekretariatan dan keuangan, dan penyediaan dan pengorganisasian tenaga kerja adalah menjadi tanggung jawab Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan. Masalah yang muncul adalah kekurangan sumber daya manusia atau tenaga ahli yang sesuai untuk layanan administrasi

dan layanan publik yang responsif dan berbasis teknologi. Belum optimalnya mengelola informasi terkait kinerja DPRD yang dipublikasikan dalam hal informasi yang mudah diakses oleh publik dapat meningkatkan transparansi dan publikasi yang efektif. Dari segi pelayanan saran masukan yang diberikan harus lebih diperhatikan agar terciptanya inovasi pelayanan yang lebih baik.

Pelayanan yang baik dari Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bintan memegang peran penting dalam memastikan kinerja DPRD yang efektif dan efisien serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif tersebut. Pelayanan yang berkualitas akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD, membuat mereka merasa dihargai dan didengarkan ketika pelayanan dari Sekretariat DPRD responsif dan efisien. Selain itu, pelayanan publik yang baik juga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan karena mereka akan lebih termotivasi untuk berpartisipasi jika aspirasi dan kebutuhan mereka diperhatikan oleh DPRD. Transparansi dalam pelayanan publik juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja DPRD, membuat masyarakat lebih percaya dan menghormati DPRD karena proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan yang berkualitas juga membantu memperkuat legitimasi DPRD di mata masyarakat dengan menunjukkan bahwa DPRD bertanggung jawab dan berkomitmen

untuk melayani kepentingan publik. Selain itu, strategi pelayanan yang baik dapat membantu Sekretariat DPRD bekerja lebih baik, menghemat waktu dan sumber daya, dan memastikan bahwa proses administratif berjalan lancar.

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelayanan yang disediakan oleh Sekretariat Dewan DPRD kepada DPRD Kabupaten Bintan. Maka dari itu, peneliti mengangkat judul "Strategi Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bintan" sebagai fokus penelitian Tesis.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2014:4). Untuk menganalisis Strategi Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bintan. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini, dengan metode pengumpulan data termasuk wawancara, dokumentasi, dan observasi. kemudian dianalisis dengan melalui reduksi data, penyesuaian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Untuk memastikan bahwa pelayanan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berjalan dengan baik dan bekerja dengan baik, peran strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah menyediakan berbagai informasi dan dokumentasi yang diperlukan oleh anggota Dewan untuk menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bintang Nomor 33 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD memiliki tanggung jawab menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, memberikan dukungan untuk tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat DPRD memiliki fungsi yang harus dilaksanakan.

- a) Menangani pengelolaan kesekretariatan Dewan;
- b) Menangani pengelolaan keuangan Dewan;
- c) Memfasilitasi pelaksanaan pertemuan Dewan;
- d) Penyediaan dan koordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
- e) Pelaksanaan fungsi tambahan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Teori Strategi menurut Kotten digunakan untuk mempelajari strategi pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat Dewan DPRD kepada DPRD Kabupaten Bintan. Teori ini mengemukakan empat variabel strategi yaitu organisasi, program, pendukung sumber daya, dan kelembagaan (Salusu, 1996).

Strategi Organisasi

strategi organisasi yang diterapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan, dengan fokus

husus pada penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). Berdasarkan teori Kotten, strategi organisasi melibatkan pengembangan inisiatif, tujuan, dan misi baru untuk mencapai visi organisasi. Implementasi SOP di Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan merupakan salah satu bentuk strategi organisasi yang signifikan.

Wawancara dengan kepala bagian umum mengungkapkan bahwa SOP memberikan panduan yang jelas bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas mereka, mengurangi ambiguitas, dan memastikan keseragaman dalam pelaksanaan tugas. Ini menunjukkan bahwa SOP adalah instrumen penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam tugas-tugas administratif DPRD.

Wawancara dengan ketua komisi III dan ketua komisi I DPRD Kabupaten Bintan menyoroti kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan. Mereka mengapresiasi upaya Sekretariat dalam memastikan kebutuhan administrasi dan logistik DPRD terpenuhi dengan baik dan tepat waktu, serta menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung berbagai kegiatan dan tugas-tugas anggota DPRD.

Penilaian positif dari anggota DPRD mengindikasikan bahwa penerapan SOP dan strategi pelayanan yang tinggi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan telah efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas DPRD dan memenuhi kebutuhan administrasi serta logistik dengan baik.

Strategi Program

Implementasi strategi program dalam meningkatkan kualitas pelayanan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan, dengan memperhatikan prediksi tentang apa yang akan terjadi dan apa yang seharusnya terjadi. Strategi program melibatkan serangkaian tindakan yang terkoordinasi untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan tertentu.

Dalam wawancara dengan kepala bagian umum, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan telah mengimplementasikan beberapa sistem manajemen informasi untuk mengelola dokumen dengan lebih efisien dan mempermudah akses informasi bagi anggota DPRD. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan waktu anggota DPRD yang sibuk dengan berbagai tugas, sehingga upaya dilakukan dengan mengatur jadwal yang fleksibel dan menyediakan berbagai cara untuk memberikan masukan.

Ketua komisi III dan komisi I DPRD Kabupaten Bintan juga memberikan penilaian positif terhadap program-program yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD. Mereka menyoroti peningkatan efisiensi administrasi melalui penggunaan teknologi informasi, penyediaan layanan informasi yang lebih baik kepada anggota DPRD, serta pelatihan dan bimbingan tentang penggunaan fasilitas dan layanan yang disediakan.

Diharapkan bahwa program-program ini akan memperbaiki cara anggota DPRD menjalankan tugas dan fungsi mereka.

Ketua fraksi gabungan/komisi II menyatakan bahwa Sekretariat DPRD telah melakukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki pelayanan kepada anggota DPRD, seperti meningkatkan koordinasi antar bagian, melaksanakan pelatihan atau workshop secara berkala, dan melakukan evaluasi terhadap proses pelayanan yang ada. Upaya-upaya ini diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota DPRD.

Dengan demikian, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan terbukti cukup efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota DPRD. Penggunaan teknologi informasi, pelatihan SDM, koordinasi antar bagian, serta evaluasi terus-menerus menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan tersebut.

Strategi Pendukung Sumber Daya

Strategi pendukung sumber daya yang diterapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan dalam mengelola sumber daya manusia (SDM) mereka. Strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia, termasuk tenaga kerja, anggaran, dan sarana-prasarana, agar pelayanan yang diberikan dapat optimal.

Wawancara dengan kepala bagian umum mengungkapkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan memiliki strategi pengelolaan SDM yang fokus pada rekrutmen yang selektif, pelatihan berkelanjutan, pengembangan keterampilan dan kompetensi, serta menerapkan sistem penilaian kinerja yang transparan dan objektif. Upaya ini mencakup pelatihan internal maupun eksternal, kerjasama dengan lembaga pelatihan profesional, serta dukungan terhadap partisipasi staf dalam seminar, workshop, dan konferensi untuk meningkatkan wawasan dan keterampilan mereka.

Ketua fraksi gabungan/komisi II juga menyatakan kebutuhan akan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan, terutama dalam bidang teknologi informasi dan manajemen data. Ia mengapresiasi program pelatihan dan workshop yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD.

Meskipun upaya yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan sudah baik dalam menyediakan SDM yang berkualitas, masih terdapat ruang untuk peningkatan lebih lanjut, terutama dalam hal rekrutmen tenaga ahli dan pelatihan SDM agar pelayanan kepada anggota DPRD dapat terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan yang berkembang.

Ketua komisi I DPRD Kabupaten Bintan juga menyoroti bahwa meskipun jumlah SDM yang ada sudah cukup memadai, dari segi kualitas dan kompetensi masih perlu peningkatan. Sekretariat DPRD telah

menyusun dan menerapkan SOP untuk memastikan setiap unit memahami tugas dan peran mereka dengan jelas, serta bagaimana berkoordinasi dengan unit lain.

Upaya dalam mengelola sumber daya manusia melalui pelatihan, pengembangan keterampilan, dan penerapan SOP membantu memastikan pelayanan yang optimal kepada anggota DPRD dan masyarakat.

Strategi Kelembagaan

Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan menerapkan strategi kelembagaan yang efektif dalam mendukung implementasi kebijakan dan program. Strategi kelembagaan ini mencakup pembangunan dan pengelolaan struktur organisasi yang efektif, termasuk perancangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan program, serta pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara jelas dan efisien.

Dalam wawancara dengan ketua komisi III DPRD Kabupaten Bintan, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD menyediakan dukungan logistik dan administrasi untuk kegiatan pengawasan, serta membantu dalam penyusunan laporan hasil pengawasan dan dokumentasi kegiatan pengawasan. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi yang erat antara Sekretariat DPRD dan komisi-komisi yang bertanggung jawab atas bidang pengawasan tertentu, yang merupakan langkah efektif dalam menerapkan strategi kelembagaan.

Ketua komisi I DPRD Kabupaten Bintan juga menyatakan bahwa Sekretariat Dewan bekerja sama dengan anggota DPRD dalam menyusun agenda kegiatan tahunan dan bulanan, termasuk rapat paripurna, rapat komisi, kunjungan kerja, dan kegiatan pengawasan. Dengan menyusun agenda bersama, semua kegiatan dapat diatur dengan baik dan tidak terjadi benturan jadwal, yang juga merupakan contoh penerapan strategi kelembagaan yang efektif.

Ketua komisi III DPRD Kabupaten Bintan menyatakan bahwa mereka memiliki mekanisme koordinasi yang terdiri dari rapat koordinasi rutin, sistem komunikasi berbasis teknologi, dan penunjukan koordinator antar bagian. Ini adalah langkah yang baik untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi di antara anggota DPRD dan dengan pihak eksternal, seperti lembaga pemerintah daerah lainnya, lembaga swadaya masyarakat, dan perusahaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik.

Melalui upaya-upaya ini, Strategi kelembagaan yang efektif telah digunakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan program, yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan yang diberikan kepada anggota DPRD dan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa Sekretariat DPRD

Kabupaten Bintan telah menerapkan berbagai strategi dari teori Kotten, yaitu strategi organisasi, program, pendukung sumber daya, dan kelembagaan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada anggota DPRD dan masyarakat secara keseluruhan.

Pertama, Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan telah berhasil menerapkan strategi organisasi dengan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memberikan panduan yang jelas bagi anggota DPRD dalam menjalankan tugas mereka. Implementasi SOP ini membantu mengurangi ambiguitas dan memastikan keseragaman dalam pelaksanaan tugas.

Kedua, Upaya-upaya yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan dalam mengimplementasikan sistem manajemen informasi, menyediakan layanan informasi yang lebih baik, dan memberikan pelatihan serta bimbingan kepada anggota DPRD adalah contoh dari penerapan strategi program untuk mencapai tujuan tertentu dengan lebih efisien dan efektif.

Ketiga, Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan telah menerapkan strategi pendukung sumber daya manusia (SDM) dengan fokus pada rekrutmen yang selektif, pelatihan berkelanjutan, dan pengembangan keterampilan dan kompetensi. Upaya ini untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia agar pelayanan yang diberikan dapat optimal.

Keempat, Melalui langkah-langkah seperti penyediaan dukungan logistik dan administrasi, penyusunan agenda kegiatan,

mekanisme koordinasi rutin, dan penunjukan koordinator antar bagian, Sekretariat DPRD Kabupaten Bintan telah berhasil menerapkan strategi kelembagaan yang efektif dalam mendukung implementasi kebijakan dan program.

Daftar Referensi

- Anggraeni, N., & Utomo, S. D. (2015). *Pelayanan Publik Bagi Disabilitas*. Pattiro.
- Cahayani, A. (2005). *Strategi dan Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia* (D. S (ed.)). Indeks.
- Handayani, A., & Sarwono, A. E. (2021). *Manajemen Strategis*. UNISRI Press.
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (M. E. Kurnanto (ed.)). Alfabeta Bandung.
- Kasahara, E. (2016). *Manajemen Strategis Praktis* (A. Prabawati (ed.)). Lautan Pustaka.
- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nurmandi, A. (2010). *Manajemen Pelayanan Publik*. PT. Sinergi Visi Utama.
- Purwanto, E. (2012). *Menuju Manajemen Publik Kelas Dunia Untuk Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia.
- Rachman, M. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik*. CV Tahta Media Group.
- Rangkuti, F. (1997). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Gramedia Pustaka Umum.
- Salusu. (1996). *Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit* (A. A. Nusantara (ed.)). PT Grasindo.
- Satori, D., & Komariah, A. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sellang, K., Jamaluddin, & Mustanir, A. (2019). *Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dimensi, Konsep, Indikator dan Implementasinya* (p. 3). CV. Penerbit Qiara Media.
- Sondang, P. S. (2005). *Manajemen Strategik* (ke-6). Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (21st ed.). Alfabeta.
- Anirwan, & Annas, A. (2020). *Upaya Peningkatan Kinerja Layanan Sekretariat Dprd Kabupaten Soppeng*. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 2(2).
- Asmarabia, & Kristanto, B. (2023). *Analisis Kinerja Sekretariat Dprd Pasca Berlakunya Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2023 Di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan*. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1).
- Efriyadi. (2021). *Peranan Staf Komisi Dalam Menunjang Aktivitas Kegiatan Komisi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Meranti*. *MAP (Jurnal*

Manajemen Dan Administrasi Publik), 4(3).

- Juru, N. A., & Gorda, A. A. . E. S. (2021). Analisis Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng. *Perspektif*, 10(1), 241.
- Kusumah, S., Soehardi, D. V. L., & Lidya, M. (2022). Analisis Pelayanan Publik Pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Tanjungpinang. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 5733.
- Sellang, K., Jamaluddin, & Mustanir, A. (2019). Strategi Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dimensi, Konsep, Indikator dan Implementasinya (p. 3). CV. Penerbit Qiara Media.
- Sumiati, Harahap, R. H., & Isnaini. (2021). Penyelenggaraan Administrasi Di Bagian Umum Pemerintahan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(1).
- Tanjung, F. M., & Fadhly, Z. (2022). Strategi Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 9(4).